Katalog BPS : 2303003.82

Survei Angkatan Kerja Nasional

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA AGUSTUS 2015

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA

Survei Angkatan Kerja Nasional

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA AGUSTUS 2015

https://maluut.bps.go.id

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA AGUSTUS 2015

ISBN : 978-602-6755-15-5
No. Publikasi : 82520.1603
Katalog BPS : 2302003.82
Ukuran Buku : B5 (21,5 x 16,5)
Jumlah Halaman : vi+29 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

http://malut.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Maka dari itu data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1976. Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Publikasi Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2015 merupakan publikasi yang berisi berbagai data dan informasi seputar ketenagakerjaan Maluku Utara pada bulan Agustus 2015. Publikasi ini menyajikan analisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan ketenagakerjaan serta potensi ketenagakerjaan yang ada di Maluku Utara.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini, kebutuhan data ketenagakerjaan lebih mudah dipahami oleh pengguna data baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

http://maluku.bps.go.id

Ternate, Februari 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara

Drs. Misfaruddin, M.Si.

http://malut.bps.go.id

DAFTAR ISI

UMUM	1
TUJUAN	2
CAKUPAN	2
PENJELASAN TEKNIS	2
PARTISIPASI DUNIA KERJA	3
INDIKATOR TENAGA KERJA	10
INDIKATOR PENGANGGURAN	16
TABEL-TABEL LAMPIRAN	21

http://malut.bps.go.id

http://malut.bps.go.id

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA AGUSTUS 2015

UMUM

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan di Maluku Utara. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986–1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, baru sejak tahun 1994–2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002–2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005–2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II).

Jumlah sampel untuk Sakernas Agustus 2015 sebanyak 2.560 rumah tangga

Mulai tahun 2011 Sakernas dilakukan kembali secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*The International Labour Organization*). Hasil Sakernas Triwulan I, II, dan IV disajikan sampai tingkat provinsi (jumlah sampel 50.000 rumah tangga). Sementara Sakernas Triwulan III, disajikan sampai tingkat kabupaten/kota, karena jumlah sampel cukup besar sekitar 200.000 rumah tangga, dimana jumlah tersebut terdiri dari 50.000 rumah tangga merupakan sampel Sakernas Triwulanan dan 150.000 rumah tangga sampel Sakernas tambahan.

Provinsi Maluku Utara Sampel terpilih untuk Sakernas Agustus 2015 berjumlah sekitar 2.560 rumah tangga. Dengan jumlah sampel tersebut hasil Sakernas tabel-tabel yang disajikan dirinci menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan daerah (perkotaan dan perdesaan), dengan penomoran tabel yang dimulai dengan tabel total.

http://maluku.bps.go.id

TUJUAN

Tujuan penyusunan buku ini adalah menyajikan data hasil Sakernas Agustus 2015 dalam bentuk ulasan dan grafik serta tabel yang lebih ringkas untuk memudahkan pengguna data dalam memahami data-data pokok yang dihasilkan. Tabel yang lebih rinci juga disajikan pada lampiran.

CAKUPAN

Pembahasan hasil Sakernas Agustus 2015 dalam publikasi ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yaitu partisipasi dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran. Pembahasan juga dilengkapi dengan data tahun sebelumnya sebagai pembanding untuk melihat perkembangannya. Sedangkan untuk melihat keterbandingan antar daerah, beberapa data dan ulasan disajikan menurut kabupaten/ kota.

Publikasi ini menyajikan data dan ulasan partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator

PENJELASAN TEKNIS

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Hal ini bertujuan untuk menjamin keterbandingan antar Negara. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Gambar 1.

DIAGRAM KENENAGAKERJAAN

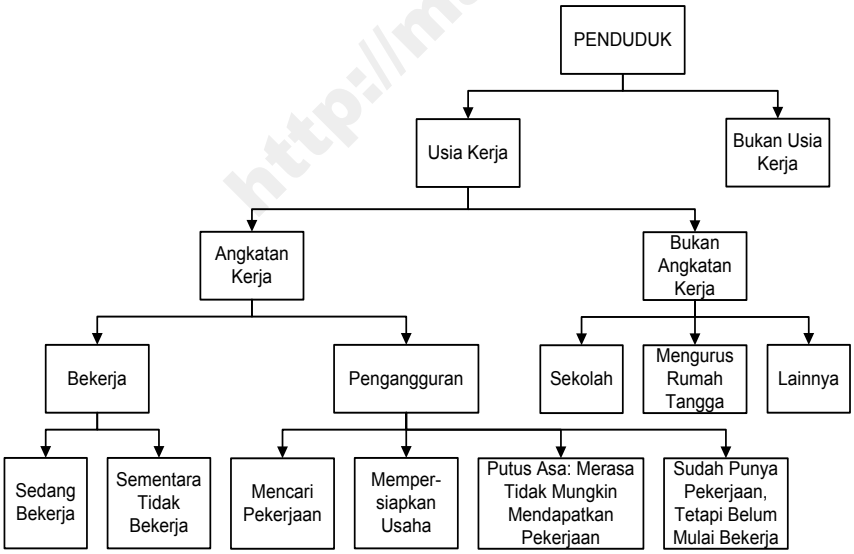

http://maluk.bps.go.id

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bevariasi sesuai kebutuhan/situasinya.

Periode referensi yang diterapkan dalam Sakernas adalah satu minggu. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

PARTISIPASI DUNIA KERJA

Jumlah angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian yaitu mereka yang sedang bekerja, sementara tidak bekerja dan mereka yang menganggur.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

TPAK dihitung dari perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas)

Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Oleh sebab itu, partisipasi penduduk dalam angkatan kerja cenderung berbeda jika dilihat antara beberapa variabel demografi.

TPAK dihitung dari persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas).
Konsep Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja (termasuk didalamnya adalah yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan penganggur. Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Gambar 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Berdasarkan Jenis Kelamin, 2010-2015

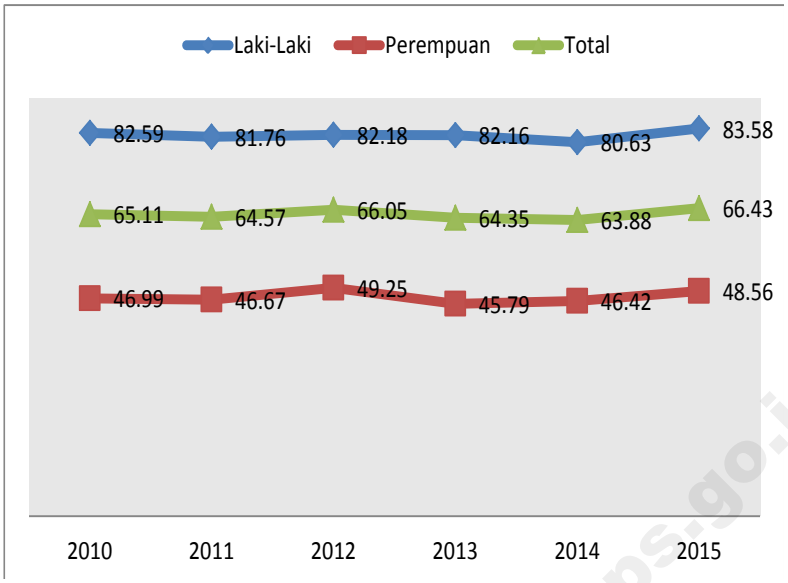

TPAK Maluku Utara pada Agustus 2016 menduduki angka tertinggi sealama enam tahun terakhir

Pasokan tenaga kerja di Maluku Utara cukup memadai yaitu selalu diatas 60 persen dari penduduk usia kerja yang dimiliki. Selama enam tahun terakhir, TPAK Maluku Utara pada Agustus 2015 ini adalah yang tertinggi. TPAK Maluku Utara mencapai 66,43 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (63,88 %). Angka tersebut berarti dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Maluku Utara yang ikut berpartisipasi aktif dalam perekonomian sekitar 66 orang. Sedangkan 34 orang lainnya melakukan kegiatan lain seperti: bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau melakukan kegiatan lainnya yang tidak bernilai ekonomis.

TPAK laki-laki sebesar 83,58 persen yang meningkat dibanding tahun sebelumnya (80,63 %). Sedangkan TPAK perempuan juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (46,42 %) yaitu sebesar 48,56 persen.

Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja Maluku Utara selama lima tahun terakhir selalu jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini tercermin dari nilai TPAK yang dihasilkan dimana TPAK laki-laki hampir dua kali lipat perempuan. TPAK laki-laki selalu diatas 80 persen, sedangkan TPAK perempuan berada di kisaran 50 persen. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga.

maluku.bps.go.id

Gambar 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Berdasarkan Jenis Kelamin, 2010-2015

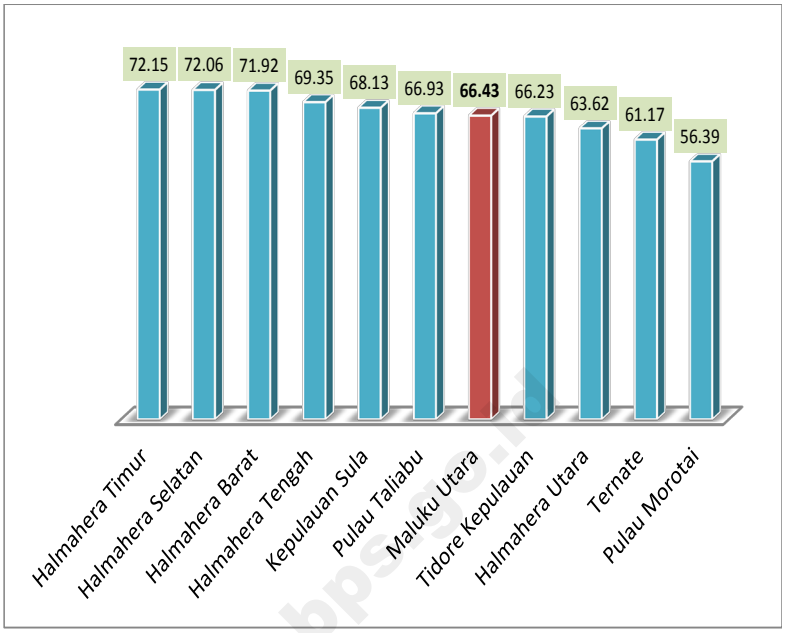

Halmahera Timur memiliki TPAK tertinggi di Maluku Utara

Di Maluku Utara, tingkat partisipasi penduduk untuk aktif secara ekonomi bervariasi antar kabupaten/ kota. Perbedaan pola pikir, tradisi, kebijakan pemerintah daerah dapat mempengaruhi ola TPAK pada tiap-tiap Kabupaten/ Kota.

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa kabupaten/ kota dengan TPAK tertinggi adalah Halmahera Timur (72,15 %) diikuti Halmahera Selatan (72,06 %), dan Halmahera Barat (71,92%). Sementara itu tiga kabupaten/ kota dengan TPAK terendah adalah Pulau Morotai (56,39 %), Ternate (61,17 %) dan Halmahera Utara (63,62 %)

http://maut.bps.go.id

Gambar 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota, Agustus 2015

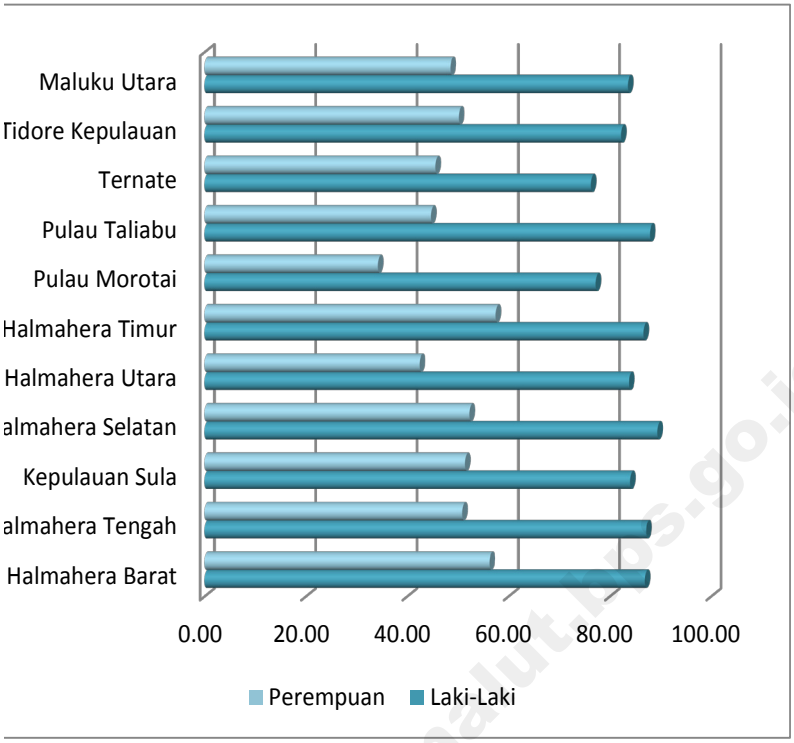

http://malut.bps.go.id

Tingkat partisipasi penduduk untuk aktif secara ekonomi juga bervariasi antara laki-laki dan perempuan di tiap kabupaten/ kota. Dimana secara umum laki-laki lebih banyak berperan aktif dalam perekonomian suatu wilayah.

Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa kabupaten/ kota dengan TPAK laki-laki tertinggi adalah Halmahera Selatan (89,40 %) diikuti Pulau Taliabu (87,94 %), dan Halmahera Tengah (87,20 %). Sementara itu tiga kabupaten/ kota dengan TPAK perempuan tertinggi adalah Halmahera Timur (57,48 %), Tidore Kepulauan (56,26 %) dan Halmahera Selatan (52,32 %).

http://malut.bps.go.id

Tabel 1. Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Maluku Utara, Agustus 2015

Pendidikan yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
< = SD	40.84	13.21	39.17	39.19
SLTP	18.20	11.65	17.80	22.24
SLTA	24.40	46.85	25.76	24.89
SMK	4.32	8.57	4.58	4.65
Diploma	3.02	4.22	3.09	2.30
Universitas	9.23	15.49	9.61	6.73
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Kualitas tenaga kerja suatu wilayah dapat diukur salah satunya dengan melihat tingkat pendidikannya. Angkatan kerja di Maluku Utara didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah , yaitu mencapai 39,17 persen dari total angkatan kerja, Sementara angkatan kerja yang berpendidikan di atas SMA hanya 17,28 persen dari total angkatankerja. Hal ini mencerminkan kualitas angkatan kerja di Maluku Utara masih rendah (Tabel 1).

39,17 persen angkatan kerja di Maluku Utara berpendidikan rendah

http://maluku.bps.go.id

Tabel 2. TPAK Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Maluku Utara, Agustus 2015

Pendidikan yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Maluku Utara
	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	
< = SD	88.04	48.46	58.33	67.55	66.40
SLTP	71.26	33.80	42.55	56.96	53.17
SLTA	84.73	46.31	61.12	74.92	68.73
SMK	81.12	42.54	56.45	75.70	65.36
Diploma	91.25	88.06	83.16	92.88	89.44
Universitas	96.49	92.89	94.38	95.21	94.76

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dari pada TPAK perempuan utamanya pada jenjang pendidikan menengah ke bawah.

TPAK penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan yaitu diploma dan universitas paling tinggi dibandingkan semua jenjang pendidikan yaitu disekitar 90 persen. Dengan kata lain hampir semua penduduk usia kerja yang berpendidikan diploma dan universitas berpartisipasi aktif dalam pasar kerja.

Berdasarkan tempat tinggalnya, ternyata untuk pendidikan menegah kebawah di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Jadi yang aktif dalam pasar tenga kerja di pedesaan masih didominasi oleh yang berpendidikan menengah kebawah. Sedangkan jika dibedakan menurut jenis kelamin. TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dari pada TPAK perempuan utamanya pada jenjang pendidikan menengah ke bawah.

http://malutprov.go.id

INDIKATOR TENAGA KERJA

a.Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Dengan kemajuan pembangunan, suatu daerah biasanya akan mengharapkan untuk melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Kategori status Pekerjaan Utama pada publikasi ini dibedakan menjadi 7 (tujuh) yaitu :

1.Berusaha sendiri
2.Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar
3.Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar
4.Buruh/karyawan
5.Pekerja bebas pertanian
6.Pekerja bebas non pertanian
7.Pekerja Tak Dibayar

http://maluku.bps.go.id

Tabel 3. Persentase Penduduk yang bekerja menurut status dalam pekerjaan utama, jenis kelamin dan daerah tempat tinggal, Agustus 2015

Status Pekerjaan Utama	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
1. Berusaha sendiri	24.08	18.59	22.89	14.75	20.04
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	8.46	24.61	23.84	13.87	20.35
3. Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar	2.86	3.56	4.61	1.09	3.38
4. Buruh/karyawan/pegawai	49.01	20.51	28.83	26.52	28.02
5. Pekerja bebas di pertanian	1.07	3.60	3.96	1.02	2.93
6. Pekerja bebas di non pertanian	5.50	2.52	4.53	1.02	3.30
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	9.02	26.62	11.34	41.72	21.98
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Penduduk Maluku Utara yang bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai memiliki persentase tertinggi mencapai 28,02 persen, diikuti pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 21,98 persen, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 20,35 persen. Sementara pekerja yang berstatus berusah dibantu buruh tetap/dibayar dan pekerja bebas pertanian maupun non pertanian sangat kecil, bahkan kurang dari lima persen.

Pekerja di perkotaan hampir separuhnya berstatus buruh/ karyawan/ pegawai

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, pekerja di perkotaan hampir separuhnya berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu mencapai 49,01 persen. Diikuti terbesar kedua berusaha sendiri sebesar 24,08 persen dan pekerja keluarga/ tak dibayar sebesar 9,02 persen. Sedangkan pekerja di pedesaan paling banyak berstatus pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 26,62 persen, diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar. sebesar 24,61 persen.

Sementara berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki paling banyak sebagai buruh yaitu sebesar 28,83 persen. Sedangkan pekerja perempuan hampir separuhnya adalah pekerja keluarga/tak dibayar mencapai 41,72 persen.

Tabel 4. Persentase Penduduk yang bekerja menurut status dalam pekerjaan utama menurut Kabupaten/ Kota, Agustus 2015

Kabupaten/ Kota	Status Pekerjaan Utama (%)						
	1	2	3	4	5	6	7
Halmahera Barat	19.46	28.33	2.37	18.07	5.20	0.15	26.41
Halmahera Tengah	16.92	23.39	3.52	24.41	5.00	3.77	23.00
Kepulauan Sula	17.28	24.45	2.93	21.81	3.76	0.33	29.43
Halmahera Selatan	14.76	26.02	2.36	22.30	2.50	2.40	29.65
Halmahera Utara	27.80	19.59	3.36	20.75	2.89	2.32	23.29
Halmahera Timur	13.65	27.62	2.62	19.98	2.88	4.50	28.75
Pulau Morotai	35.31	15.97	1.30	34.84	4.52	4.12	3.94
Pulau Taliabu	17.52	20.44	11.95	16.01	5.66	0.00	28.41
Ternate	23.66	7.65	2.49	49.66	0.20	6.58	9.76
Tidore Kepulauan	15.43	16.11	6.79	37.04	3.13	6.66	14.85

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

http://malut.bps.go.id

Dari sembilan kabupaten/ kota yang ada di Maluku Utara, memiliki pekerja dengan status pekerjaan utama yang bervariasi. Hanya yang menonjol sedikit berbeda dengan kabupaten lain adalah di Ternate dan Tidore Kepulauan yaitu di wilayah ini pekerja yang berstatus buruh/ karyawan/pegawai tertinggi dibanding yang lain yaitu mencapai 49,66 persen di ternate dan 37,04 persen di Tidore Kepulauan.

b.Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam berbagai literatur pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya pekerja berpindah dari desa ke kota. Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu A(griculture), M(anufacture dan S(ervices), berdasarkan pada definisi sektor *Internasional Standard Industrial Classsification* (ISIC) System.

Sampai dengan saat ini, Maluku Utara masih merupakan provinsi dengan karakter agraris. Dilihat dari lapangan usahanya separuh lebih atau mencapai 50,23 persen penduduk Maluku Utara bekerja di sektor pertanian. Namun jika dilihat selama tiga tahun terkhir ini perlahan persentasenya menurun mulai dari 54,31 persen di 2013, 52,51 persen di 2014 dan menjadi 50,23 persen di 2015.

Selama tiga tahun terakhir pekerja di Maluku Utara mulai bergeser dari sektor agraris menuju sektor lainnya.

Jika ditinjau menurut klasifikasi wilayah, terdapat perbedaan yang signifikan antara penyerapan lapangan pekerjaan antara di perkotaan dan perdesaan. Untuk wilayah perkotaan lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor S(ervices)/jasa-jasa , dimana 74,64 persen dari penduduk yang bekerja bekerja di sektor ini, sementara untuk wilayah perdesaan sektor A(griculture)/Pertanian tetap mendominasi dalam kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan mampu menampung 64,16 persen. Sedangkan untuk manufaktur masih relative sama antara desa dan kota.

Tabel 5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2015

Lapangan Usaha	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
Pertanian	11.33	64.16	52.20	46.57	50.23
Manufaktur	14.03	10.09	13.34	7.03	11.13
Jasa-Jasa	74.64	25.75	34.45	46.40	38.64
Total	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Gambar 4. Persentase Penduduk Bekerja
Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten/ Kota, Agustus 2015

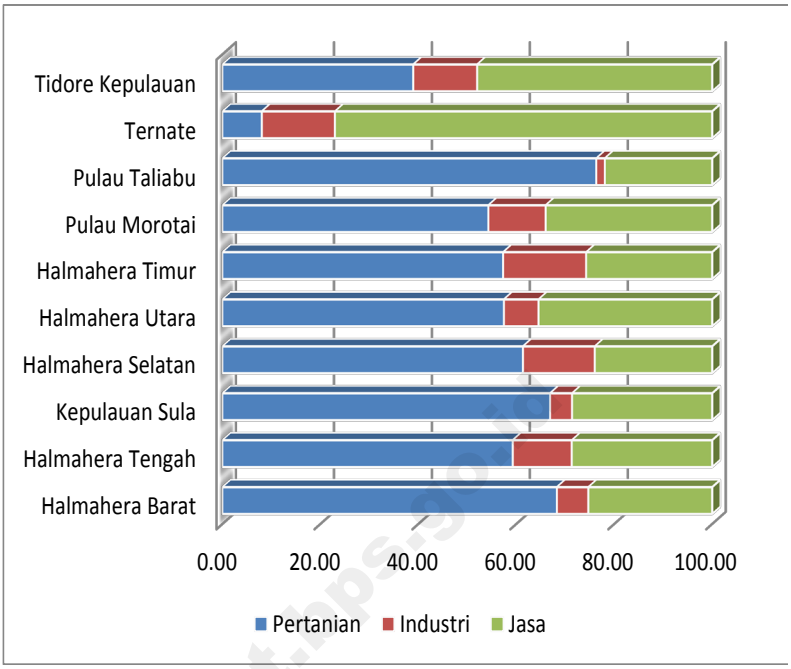

Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan terutama di wilayah administrasi Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan sektor pertanian mulai digeser oleh sektor jasa, sementara untuk Kabupaten/Kota lainnya sektor pertanian masih tampak mendominasi.

c.Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari full time, sebagai proporsi dari total pekerja.

http://maluut.bps.go.id

Tabel 6. Pekerja Paruh Waktu Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Agustus 2015

Rincian	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
Penduduk yang Bekerja	127,202	355,341	313600	168943	482543
Pekerja Paruh Waktu	23,585	99,630	56290	66925	123215
Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	18.54	28.04	17.95	39.61	25.53

Sumber : Badan Pusat Statistik Penduduk Provinsi Maluku Utara

Selama tiga tahun terakhir, tingkat pekerja paruh waktu di Maluku Utara terus mengalami penurunan dari 30,08 persen pada 2013 menjadi 27,22 persen pada 2014 dan di 2015 menjadi 25,53 persen. Pada Agustus 2015 tingkat pekerja paruh waktu mencapai 25.53 persen yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 26 orang pekerja paruh waktu. Sementara *share* perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 39,61 persen yang berarti bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 40 orang adalah perempuan.

Tingkat pekerja paruh waktu di Maluku Utara selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan

Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, masing-masing 39,61 persen dan 17,95 persen

Sementara itu, jika dilihat menurut daerah, perdesaan memiliki pekerja paruh waktu 9,50 persen lebih tinggi dibanding daerah perkotaan, masing-masing sebesar 28,04 persen dan 18,54 persen.

http://maluk.bps.go.id

d.Pekerja Sektor Informal

Sektor informal merupakan bagian penting dalam perekonomian di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Tabel 7 Persentase Pekerja Formal Informal Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Agustus 2015

Sektor	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
Formal	67.77	44.22	55.64	40.77	50.43
Informal	32.23	55.78	44.36	59.23	49.57

Sumber : Badan Pusat Statistik Penduduk Provinsi Maluku Utara

Sektor Informal masih didominasi oleh perempuan

Situasi ketenagakerjaan di Maluku Utara pada Agustus 2014 didominasi oleh sektor formal dimana dari seluruh penduduk yang bekerja, 50,43 persen bekerja di sektor formal. Sementara di perkotaan, dari seluruh penduduk yang bekerja, sekitar 67,77 persen bekerja di sektor formal. Sebaliknya di pedesaan di dominasi oleh sektor informal sebesar 55,78 persen.

Sementara berdasarkan jenis kelamin di sektor informal didominasi oleh perempuan yaitu mencapai 59,23 persen. Sebaliknya di sektor formal didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 55,64 persen.

http://maluku.bps.go.id

INDIKATOR PENGANGGURAN

Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya kegagalan dalam pasar kerja untuk menyerap sejumlah angkatan kerja.

TPT atau biasanya disebut sebgai tingkat pengangguran ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan serta merta sebagai pengukuran kesulitan ekonomi, tingkat kemiskinan "tidak selalu" berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Sebagai contoh seseorang dengan kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan (memilih menganggur daripada bekerja pada tingkat pendapatan atau status sosial yang lebih tinggi) meskipun kadang berarti melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara si miskin cenderung mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informative yang mencerminkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informative yang mencerminkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan kesejahteraan ekonomi. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi tersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan mencari pekerjaan

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok tertentu pekerja) oleh tenaga kerja yang sesuai, yang merupakan jumlah total orang yang bekerja dan tidak bekerja dalam kelompok. Harus ditekankan bahwa pengertian tersebut merupakan tenaga kerja atau bagian aktif secara ekonomi penduduk yang berfungsi sebagai dasar untuk statistik ini, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja"kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian.

http://malut.bps.go.id

Gambar 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Maluku Utara, 2010-2015

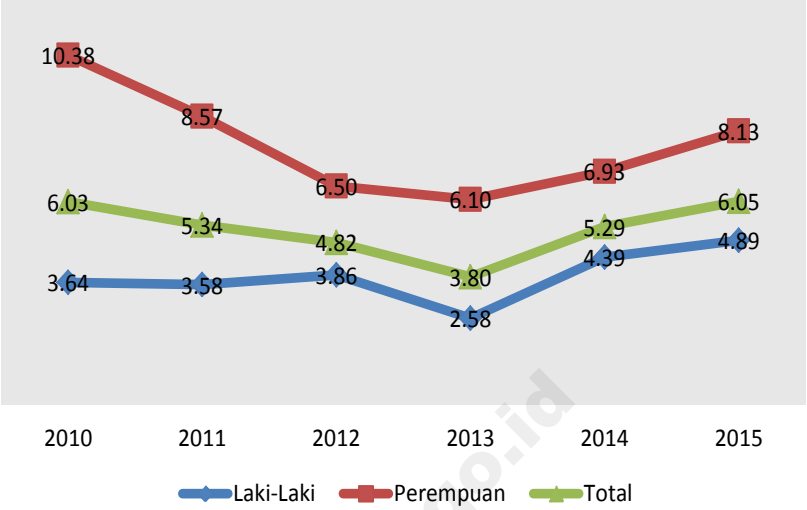

Tingkat Pengangguran Terbuka Maluku Utara selama tiga tahun terakhir terus meningkat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku Utara pada Agustus 2015 adalah sebesar 6,05 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia yang termasuk kategori penganggur ada sekitar 6 orang.

Pada tiga tahun terakhir TPT di Maluku Utara mengalami peningkatan. Dari yang semula 3,08 pada Agustus 2013 naik menjadi 5,29 pada Agustus 2014 dan terakhir naik lagi menjadi 6,05 pada Agustus 2015.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2015 TPT perempuan sebesar 8,13 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki yang sebesar 4,89 persen. TPT perempuan sebesar 8,13 persen berarti dari 100 orang perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja, 8 diantaranya masih mencari kerja dan belum mendapatkan pekerjaan/ menganggur.. Sedangkan untuk laki-laki dari 100 orang laki-laki yang termasuk dalam angkatan kerja, 5 diantaranya masih mencari kerja dan belum mendapatkan pekerjaan/ menganggur.

https://maluku.bps.go.id

Tabel 8 TPT Menurut Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Maluku Utara, Agustus 2015

Pendidikan yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Maluku Utara
	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	
< = SD	1.35	3.09	3.53	1.86	2.04
SLTP	2.76	6.66	4.78	3.74	3.96
SLTA	9.36	15.19	9.92	11.72	11.00
SMK	8.78	18.34	4.80	16.97	11.32
Diploma	2.65	12.68	6.16	9.28	8.25
Universitas	8.16	11.53	7.62	12.30	9.75

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah lulusan SMK yaitu mencapai 11,32 persen. Lalu menduduki urutan kedua adalah lulusan SLTA yaitu 11,00 persen. Hal ini bisa disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan yang bisa menyerap sumber daya manusia dengan spesifikasi yang ada.

Tingkat pengangguran tertinggi adalah pencari kerja lulusan SMK yaitu mencapai 11,32 persen

Pada Agustus 2015 ini, tingkat pengangguran terbuka perempuan lebih tinggi daripada laki-laki untuk semua jenjang pendidikan. Untuk jenjang pendidikan lulusan SMK tingkat pengangguran perempuan mencapai 18,34 persen. Tertinggi kedua adalah lulusan SLTA perempuan dengan tingkat pengangguran mencapai 15,19 persen.

Sedangkan bila kita lihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya tingkat pengangguran di desa maupun perkotaan bervariasi untuk tiap jenjang pendidikan. Di Perkotaan tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah pencari kerja lulusan SLTA yaitu sebesar 9,92 persen. Sedangkan di pedesaan ingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah pencari kerja lulusan SMK yaitu mencapai 16,97 persen. (Tabel8)

http://malut.bps.go.id

Gambar 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Berdasarkan Kabupaten/ Kota, Agustus 2015

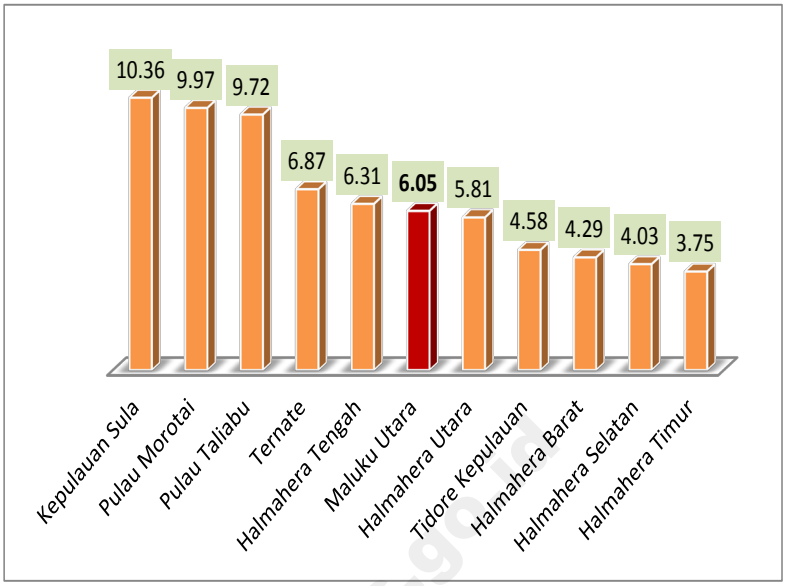

Tingkat pengangguran tertinggi di Keopulauan Sula mencapai 10,36 persen

Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa kabupaten/ kota dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi adalah Kepualauan Sula (10,36 %) diikuti Pulau Morotai (9,97 %), dan Pulau Taliabu (9,72 %). Sementara itu tiga kabupaten/ kota dengan TPT terendah adalah Halmahera Timur (3,75 %), Halmahera Selatan (4,03 %) dan Halmahera Barat (4,29 %).

http://haltengkab.bps.go.id

Gambar 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten/ Kota, Agustus 2015

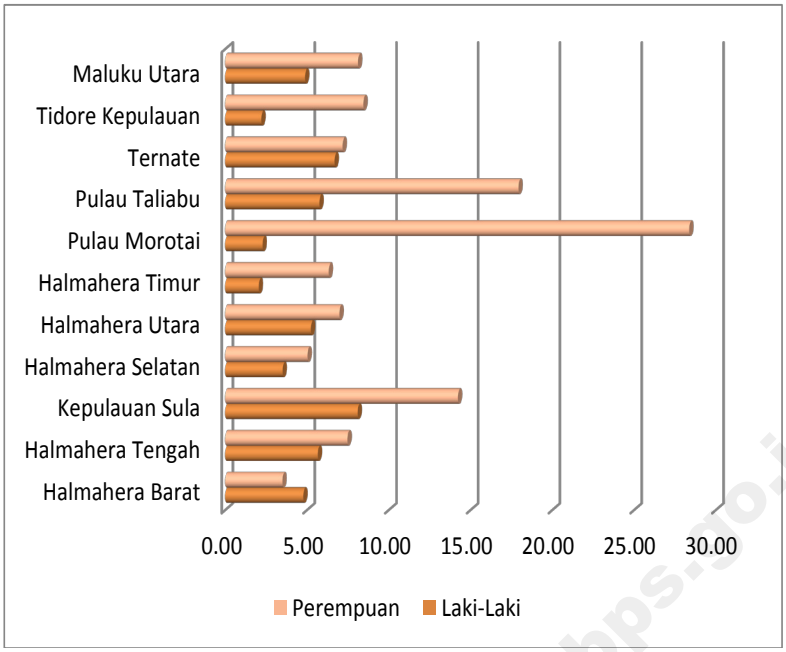

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin TPT Laki-laki tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Sula yaitu 8,10 persen dan terendah adalah Kabupaten Pulau Morotai yaitu 2,29 persen. Sedangkan untuk perempuan dapat dilihat bahwa kabupaten/ kota dengan TPT perempuan tertinggi adalah Pulau Morotai yaitu mencapai 28,38 persen. Sedangkan TPT Perempuan terendah adalah di Halmahera Timur yaitu 6,33 persen.

http://maluut.bps.go.id

TABEL-TABEL LAMPIRAN

http://malut.bps.go.id

http://malut.bps.go.id

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2012-2015

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
Halmahera Barat	104 807	106 791	108 769	110 717
Halmahera Tengah	45 712	47 079	48 414	49 807
Kepulauan Sula	89 374	91 406	93 435	95 285
Halmahera Selatan	207 728	211 682	215 791	219 836
Halmahera Utara	169 599	173 117	176 573	180 100
Halmahera Timur	78 112	80 526	82 914	85 188
Pulau Morotai	55 998	57 565	59 102	60 727
Pulau Taliabu	48 880	49 510	50 067	50 709
Ternate	197 566	202 728	207 789	212 997
Tidore Kepulauan	93 299	94 493	95 813	96 979
Maluku Utara	1091 075	1114 897	1 138 667	1 162 345

Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

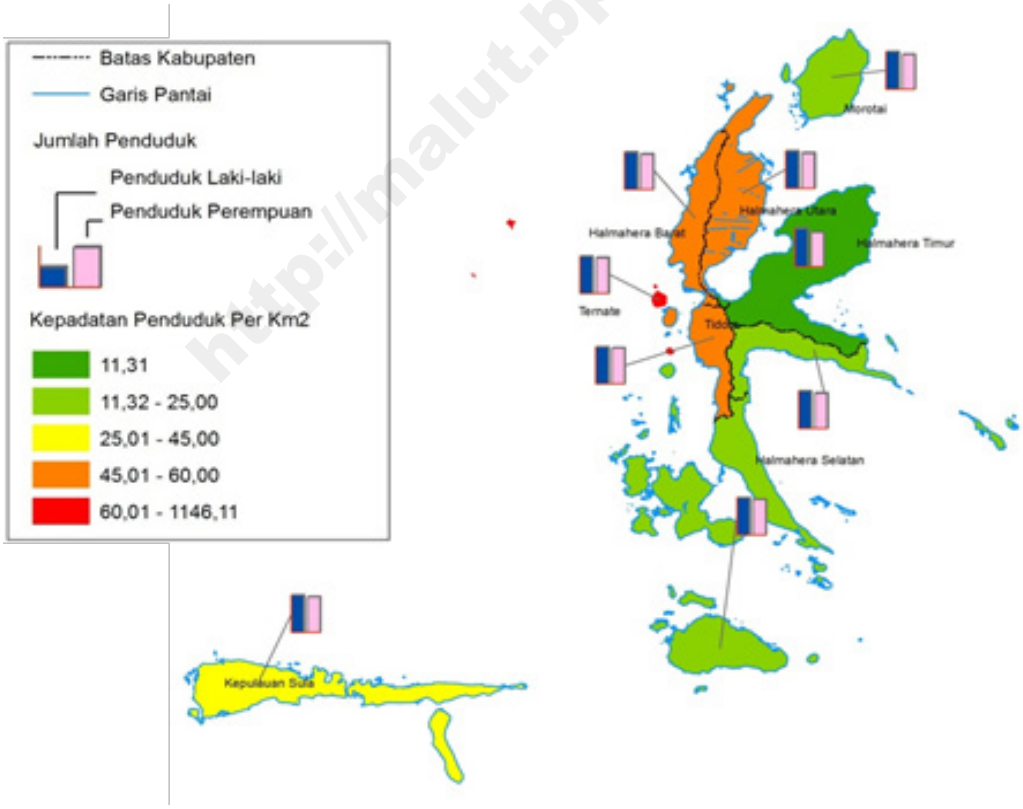

http://malut.bps.go.id

Tabel 2 Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	72 017	69 333	141 350
5-9	68 881	65 878	134 759
10-14	63 011	59 828	122 839
15-19	57 158	53 255	110 413
20-24	51 522	49 287	100 809
25-29	50 302	50 028	100 330
30-34	48 366	48 978	97 344
35-39	43 425	42 317	85 742
40-44	36 599	34 311	70 910
45-49	29 312	27 129	56 441
50-54	23 588	22 040	45 628
55-59	18 663	17 037	35 700
60-64	13 048	11 601	24 649
65-69	8 017	7 580	15 597
70-74	4 810	4 993	9 803
75+	4 478	5 553	10 031
JUMLAH	593 197	569 148	1 162 345

Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

http://malut.bps.go.id

Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dalam teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud menetap lebih dari 6 (enam) bulan.

Gambar 1.
Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2015

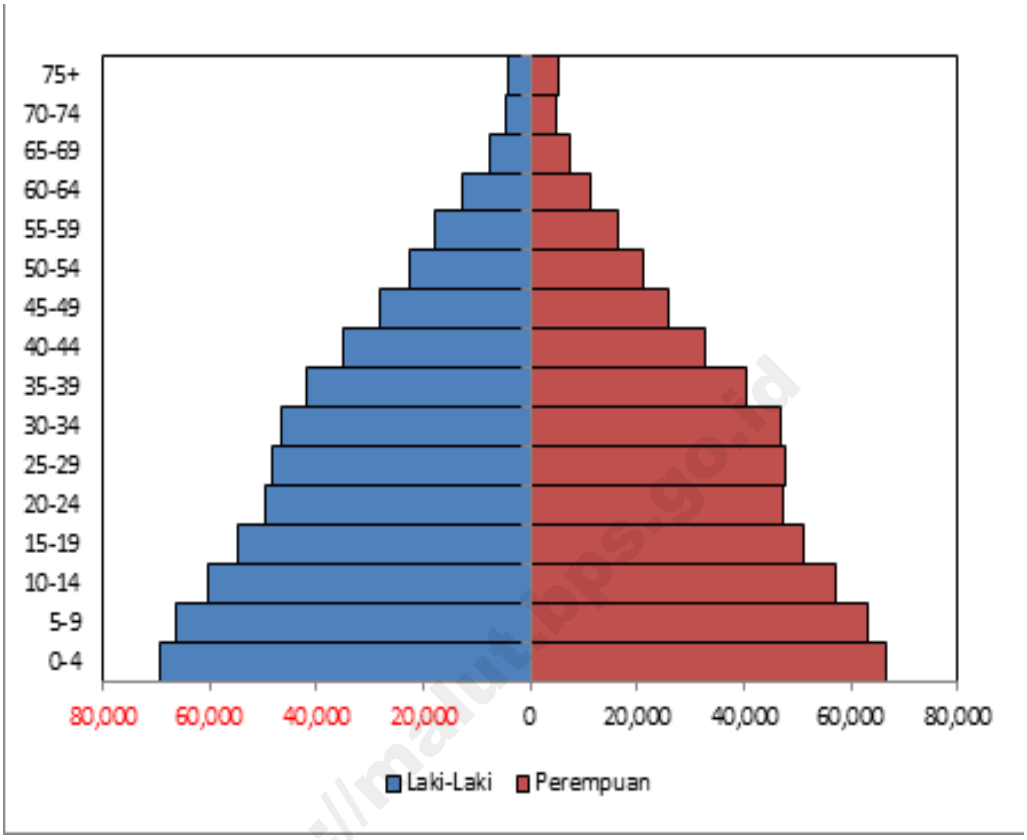

http://maluku.bps.go.id

Tabel 3 Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Jenis Kegiatan Utama

Jenis Kegiatan Utama	Agustus 2013	Agustus 2014	Agustus 2015
1. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	734,997	753,765	773,181
2. Angkatan Kerja	472,965	481,504	513,601
Bekerja	454,978	456,017	482,543
Penganggur	17,987	25,487	31,058
3. Bukan Angkatan Kerja	262,032	272,261	259,580
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64.35	63.88	66.43
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.80	5.29	6.05
6. Pekerja tidak penuh	193,217	185,431	197,227
Setengah Penganggur	54,687	61,291	74,012
Paruh Waktu	138,530	124,140	123,215

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Tabel 4 Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan	Februari 2014	Agustus 2015	Februari 2015	Agustus 2015
Berusaha sendiri	103,018	103,625	102,218	96,693
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	99,707	94,142	105,815	98,196
Berusaha dibantu buruh tetap	9,058	15,308	14,871	16,294
Buruh/karyawan	149,055	122,908	140,494	135,223
Pekerja bebas	13,604	12,846	16,101	14,140
Pekerja keluarga/tak dibayar	10,117	11,663	13,952	15,938
JUMLAH	80,927	95,525	96,701	106,059

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

http://maluut.bps.go.id

Tabel 5 Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
<= SD	203,832	189,702	208,779	197,061
SMP	80,834	88,538	88,882	87,825
SMA Umum	99,156	100,566	113,853	117,727
SMA Kejuruan	17,816	20,824	23,263	20,837
Diploma I/II/III	17,218	14,723	14,355	14,573
Universitas	46,630	41,664	41,020	44,520
JUMLAH	465,486	456,017	490,152	482,543

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

http://malut.bps.go.id

Tabel 6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
<= SD	2.10	1.71	2.25	2.04
SMP	2.52	3.31	5.12	3.96
SMA Umum	10.80	9.85	8.66	11.00
SMA Kejuruan	2.62	12.16	7.92	11.32
Diploma I/II/III	10.07	9.00	17.64	8.25
Universitas	13.04	8.42	7.55	9.75
JUMLAH	5.65	5.29	5.56	6.05

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

• Terkait ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi:
- Penduduk Usia Kerja (PUK), yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
- Penduduk Bukan Usia Kerja, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun.

• Penduduk Usia Kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

• Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

• Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga atau melakukan kegiatan lainnya.

• Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama 1 (satu) jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

• Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.

• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

• Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/ kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang mengacu pada *the International Standard of Industrial Classification* (ISIC).

• Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

http://maluttbps.bps.go.id

http://malut.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://malut.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA
Jl Stadion No 65 Ternate
Telp (0921)3127878 Fax : (0921)3126301
Homepage : http://malut.bps.go.id
Email : bps8200@bps.go.id

9 786026 755155